



Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah baik yang digunakan untuk modal usaha maupun kebutuhan sehari-hari ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dipaparkan pada bab 3, jumlah pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT Amanah Ummah pada akhir tahun 2016 sebesar 3.1% dengan jumlah pembiayaan Rp 593.449.336.<sup>1</sup> akan tetapi hal tersebut tidak membuat KSPPS BMT Amanah Ummah melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia No 6/18/PBI/2004 yang menyatakan bahwa tingkat NPF paling tinggi sebesar 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Dengan demikian, maka tingkat nilai NPF KSPPS BMT Amanah Ummah sendiri pada akhir tahun 2016 tidak melampaui ketentuan yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia, artinya tingkat NPF KSPPS BMT Amanah Ummah masih dianggap dalam kondisi wajar. Akan tetapi KSPPS BMT Amanah Ummah harus tetap mewaspadai hal tersebut agar tingkat pembiayaan bermasalahnya tidak semakin meningkat.

Pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Ummah dapat dikatakan lebih didominasi pembiayaan *murabāhah*, meskipun *musyārakah* juga termasuk produk pembiayaan di KSPPS BMT Amanah Ummah namun jarang digunakan. Pembiayaan *murabāhah* ini lebih banyak digunakan untuk usaha produktif dari pada konsumtif.

---

<sup>1</sup> Dian Aisyi ZK, *Wawancara*, Ruko Grand Ahmad Yani Frontage Road 151-P Surabaya, 9 januari 2017



















Artinya: *“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”*.

Berdasarkan ayat di atas, jika terdapat nasabah yang mengalami kesukaran atau kesulitan dalam pengembalian dana pembiayaan, maka sebaiknya lembaga keuangan tersebut memberikan kelonggaran jangka waktu pengembalian dana pembiayaan agar nasabah dapat keleluasaan waktu dalam mengembalikan dana tersebut.

- c. Penyitaan jaminan, Ketika kebijakan diatas tidak mampu menemukan titik terang dan mengalami tunggakan sampai 3 bulan, maka pihak KSPPS BMT Amanah Ummah akan melakukan penyitaan barang jaminan nasabah. Solusi seperti ini merupakan solusi yang berat untuk dilakukan oleh KSPPS BMT Amanah Ummah dan merupakan cara yang sangat efektif agar pembiayaan bermasalah dapat terbayarkan. Tetapi pada kenyataannya masih saja terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh nasabah. Seperti nasabah dengan sengaja tidak membayar dan meninggalkan jaminannya berupa BPKB atau sertifikat, sedangkan barang yang akan disita KSPPS BMT telah dijual kepada pihak lain. Pihak BMT tidak dapat melakukan penyitaan karena memang barang telah berpindah kepada pihak lain, peneliti menilai hal ini akan mengakibatkan kerugian pada BMT.



